

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Eropa sudah terjalin lebih dari 60 tahun lamanya yaitu sejak tahun 1953 dimana Eropa membentuk komunitas yang bernama *European Coal and Steel Community* (ECSC). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut sudah berjalan bahkan sebelum Uni Eropa terbentuk. Utusan dari Amerika Serikat menjadi *observer* di dalam ECSC. Kemudian di tahun 1961, utusan Amerika Serikat untuk *European Communities* (EC) didirikan di Brussels secara formal. Kemudian diimbangi dengan utusan dari *European Communities* yang hadir di Washington pada tahun 1954. Delegasi tersebut mewakili komunitas Eropa yang berurusan dengan pemerintah Amerika Serikat (*Delegation of the European Commission to the United States*, 2006).

Pada periode tahun 1990an, hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa semakin memperluas cakupan kerjasamanya di dalam bidang ekonomi dan keamanan. Ada tiga perjanjian yang terjadi di periode ini, dan tiga perjanjian tersebut menunjukkan adanya peningkatan liberalisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa di dalam hubungan ekonomi kedua pihak tersebut. *Transatlantic Declaration*, perjanjian yang muncul pada tahun 1990 merupakan pertemuan politik antara Amerika Serikat dan EC yang diadakan secara *regular*. Bidang yang difokuskan di dalam *Transatlantic Declaration* adalah bidang ekonomi, edukasi, ilmu pengetahuan dan budaya (Department of State United States of America, n.d). Kemudian sebagai upaya membangun ulang hubungan serta memperbaharui perjanjian *Transatlantic Declaration* karena adanya kesadaran atas global ekonomi, kedua belah pihak membuat perjanjian baru yang disebut dengan *New Transatlantic Agenda* (NTA) di Madrid pada tahun 1995 (Apodaca, 2014).

Sebelumnya di tahun 1988 ada pemikiran ambisius dari Sir Leon Brittan, seorang komisaris Uni Eropa yang membawa proposal yang di namakan “*the big bang*” di *New Transatlantic Marketplace* (NTM) atau pilar NTA di dalam bidang ekonomi yang secara progresif mengurangi atau mengeliminasi hambatan yang menghalangi arus pergerakan barang, servis dan modal. Brittan mempresentasikan ide untuk menghapus secara keseluruhan pembatas perdagangan dan ekonomi antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat. Namun hal ini ditolak oleh beberapa pemerintah negara Eropa karena takut akan mengganggu hukum yang ada di WTO. Tetapi proposal Brittan ini tidak serta langsung ditolak, dengan adanya pelemahan dari inisiasi Brittan ini, lahirlah perjanjian baru yang bernama *Transatlantic Economic Partnership* (TEP) di bulan Mei 1998 pada pertemuan Amerika Serikat dan Uni Eropa di Birmingham. TEP tetap berfokus di dalam mengurangi hambatan dan mengatasi rintangan peraturan di dalam ekonomi dan perdagangan kedua pihak (Kern, 2005).

Perjanjian yang tertulis diatas adalah landasan hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa yang dapat dikatakan sebagai sebuah hubungan bilateral yang sangat dalam dan hubungan paling rumit di dunia. Selama bertahun tahun, hubungan ini berjalan dan menghasilkan banyak sekali keuntungan bagi kedua belah pihak. Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki hubungan ekonomi paling besar dan paling terintegrasi di dunia. Pada masa pemerintahan Obama di tahun 2015, ekonomi *transatlantic* tercatat sebagai 46 persen GDP (*Gross Domestic Product*) dunia (World Bank, 2018). Sebagian besar investasi asing Amerika Serikat yaitu sebesar 58 persen berada di Eropa, dan Eropa merupakan sumber terbesar (69 persen) dari *foreign direct investment* (FDI) di Amerika Serikat. Data yang ada menyatakan bahwa hubungan keduanya menghasilkan lebih dari 5 triliun dollar Amerika di bidang investasi dan di dalam perdagangan barang dan servis pertahun antara Amerika Serikat dan Uni Eropa bernilai lebih dari 1 triliun dollar Amerika (Hamilton & Quinlan, 2017). Nilai tersebut bahkan bernilai dua kali lipat dibandingkan dengan

kerjasama ekonomi Amerika Serikat dengan China (Office of the United States Trade Representative, n.d).

Hubungan Amerika Serikat dengan Uni Eropa ketika masa pemerintahan Barack Obama dapat dikatakan sebagai hubungan yang harmonis di dalam bidang ekonomi. Pada tahun 2011, Presiden Obama menyatakan bahwa Amerika Serikat siap untuk membantu krisis yang terjadi di zona euro (Downing, 2011). Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Presiden dari *European Council* Herman Van Rompuy dan Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso;

*“A large part of that conversation obviously revolved around the eurozone crisis, and Presidents Van Rompuy and Barroso have been very actively engaged with the heads of government and heads of state in Europe to try to resolve this crisis. I communicated to them that the United States stands ready to do our part to help them resolve this issue. This is of huge importance to our own economy. If Europe is contracting or if Europe is having difficulties, then it’s much more difficult for us to create good jobs here at home because we send so many of our products and services to Europe; it is such an important trading partner for us.”* (The White House Office of the Press Secretary, 2011)

Selain di dalam hal bantuan untuk permasalahan di dalam Uni Eropa itu sendiri, Obama pernah menyerukan untuk adanya perdagangan bebas dengan Uni Eropa (Palmer, 2013). Padahal sebenarnya, halangan yang membatasi dua pihak ini sudah sangatlah rendah sejak adanya perjanjian perjanjian yang dipaparkan diatas.

Kesuksesan kerjasama antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa ini menjadi “abu-abu” dengan digantikannya Barack Obama dengan Donald Trump. Pencalonan Donald Trump di dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat ke-45 diwarnai dengan banyak pro dan kontra. Sebagai seorang yang awam

terhadap politik, banyak masyarakat yang skeptis terhadap kapabilitasnya jika terpilih menjadi presiden. Dengan banyaknya isu yang terjadi ketika masa kampanyenya, banyak sekali jejak pendapat di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Trump akan kalah melawan Hillary terlebih dengan banyaknya pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Trump ketika masa kampanye di tahun 2016 (Nugroho, 2016). Namun, hal ini tidak menjadi penentu untuk Trump menang di pemilihan presiden Amerika Serikat. Berbeda dari prediksi kebanyakan pengamat politik dunia, Donald Trump menang melawan Hillary Clinton dan dilantik pada tanggal 21 Januari 2017.

Dengan adanya pergantian presiden ini, Amerika Serikat seringkali membuat kebijakan yang kontradiktif dengan kebijakan ketika masa kepemimpinan Barack Obama. Tidak terkecuali kebijakan di dalam bidang ekonomi dengan Uni Eropa. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Anthony Gardner, Duta Besar Amerika Serikat di Uni Eropa bahwa politik luar negeri Amerika Serikat tidak akan lagi sama dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden (Vinceti, 2016). Seringkali Presiden Trump membuat beberapa kebijakan yang dianggap memiliki dampak yang buruk bagi hubungan Amerika Serikat dengan Uni Eropa.

Pada tahun 2018, Amerika Serikat menyatakan akan menerapkan tarif terhadap alumunium sebesar 10 persen dan baja sebesar 25 persen dari seluruh negara di dunia (Horsley, 2018). Dengan ini, Uni Eropa juga termasuk di dalam daftar negara yang harus membayar tarif yang telah di tentukan Trump. Beberapa pemimpin negara di Uni Eropa menyatakan keberatan dengan adanya tarif yang di berlakukan Washington terhadap hasil mineral di negaranya tersebut. Presiden Perancis, Emanuel Macron menyatakan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Trump ini adalah illegal dan sebuah kesalahan (Pennetier, 2018).

Kemudian di awal tahun 2019, Amerika Serikat kembali melancarkan tarif untuk kendaraan dan bagian bagian kendaraan dari Uni Eropa setelah menandatangani perjanjian mengenai ekspor daging sapi ke Uni Eropa (Li, 2019). Hal ini sebelumnya sudah pernah di rencanakan oleh Trump lewat cuitan twitternya di tahun 2018 dengan mengatakan bahwa akan menetapkan tarif untuk ekspor kendaraan dari Uni Eropa sebesar 20 persen; *“Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!”* (Trump, 2018)

Washington menyatakan akan melancarkan perang dagang terhadap Uni Eropa pada tanggal 18 Oktober 2019 (Ziady & Riley, 2019). Hal ini merupakan puncak dari konflik perdagangan sebelumnya yaitu di dalam pemberian subsidi ilegal Uni Eropa terhadap Airbus, pabrik pesawat terbang yang beroperasi di Uni Eropa. Perselisihan antara dua perusahaan pesawat terbang ini sudah berjalan dari tahun 2004 (Carbaugh & Olienyk, 2004). Namun, perselisihan ini berbeda ketika Trump menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat. Trump atas dorongan dari pemimpin Boeing menuntut Airbus dan Uni Eropa di *World Trade Organization* (WTO).

Setelah bertahun tahun menuntut Airbus, akhirnya Amerika Serikat mendapat titik terang di dalam kasus ini. WTO mengabulkan permintaan Amerika Serikat untuk memberikan tarif terhadap pesawat terbang dari Eropa, keju dan wine dari Perancis, minyak zaitun dari Spanyol serta beberapa barang ekspor dari Uni Eropa lainnya (Swanson, 2019). Pajak yang bernilai lebih dari 7,5 miliar dollar Amerika ini dianggap sebagai hukuman bagi Uni Eropa karena sudah memberikan subsidi secara ilegal terhadap airbus.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah yang sudah saya paparkan diatas, maka rumusan masalah yang terbentuk untuk skripsi ini adalah: “Mengapa di masa Pemerintahan Trump muncul peningkatan konflik ekonomi antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa di dalam bidang ekonomi?”

## **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam upaya untuk menjawab rumusan masalah dan menarik sebuah hipotesa, maka dalam menganalisis alasan adanya peningkatan konflik antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa pada masa pemerintahan Donald Trump di dalam bidang ekonomi, penulis menggunakan suatu teori besar yang bernama konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini muncul pada akhir periode perang dingin karena adanya kegagalan pemikiran neo-realis dan juga neo-liberalis dalam menjelaskan perubahan yang menyusun kembali tatanan global pada saat itu (Price & Reus-Smit, 1998).

Teori ini merupakan salah satu bagian dari teori post-positivisme dimana pemikiran esensial dari para kaum post-positivisme adalah merupakan hal yang mustahil untuk meneliti ilmu sosial jika tidak melibatkan aktor pembuat teori di dalamnya. Di dalam hal ini bermakna bahwa teori ini menjelaskan bahwa dunia internasional direpresentasikan oleh manusia yang menjadi aktor utamanya. Selalu ada subjektivitas dari para aktor pembuat teori di dalam teori yang diciptakannya. Hal tersebut sesuai dengan yang dilontarkan oleh Robert Cox, seorang mantan perwira untuk PBB yang mengatakan bahwa tidak ada teori yang netral untuk permasalahan manusia, tidak ada teori untuk kebenaran yang universal. Teori itu selalu diperuntukkan untuk seseorang dan untuk tujuan tertentu. Teori berasal dari praktek dan pengalaman serta pengalaman berhubungan dengan waktu dan tempat, jadi teori adalah bagian dan sejarah (Schouten, 2009).

Dalam pemikiran konstruktivisme, dunia internasional merupakan satu hal yang dikonstruksi oleh manusia yang ada di

dalamnya. Menurut Christian Reus-Smit, ada tiga asumsi pokok di dalam teori konstruktivisme. Asumsi penting di dalam teori ini adalah *pertama*, struktur di dalam masyarakat sangatlah mempengaruhi perilaku aktor. Struktur ini bisa berbentuk norma, nilai bahkan tatanan hukum yang ada di tengah kehidupan aktor dalam hubungan internasional. Kaum konstruktivis ini melihat perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh struktur material seperti uang, kelas dan derajat manusia seperti halnya pemikiran kaum marxis. tanpa adanya *sharing ideas* antara para aktor, maka tidak akan terjadi suatu hal penting. *Kedua*, konstruktivis melihat bahwa struktur non-material yang dijelaskan diatas sangatlah penting di dalam membentuk identitas seorang aktor dalam hubungan internasional. Kaum konstruktivis beranggapan bahwa identitas dapat membentuk kepentingan seseorang sehingga hal ini akan mengarahkan kepada suatu perilaku khas orang tersebut. Dan yang *ketiga* adalah, adanya hubungan antara struktur dan agen dan hubungan ini melengkapi satu sama lain. Inti dari poin ketiga ini adalah, struktur norma dan nilai tidak akan mungkin muncul secara tiba-tiba dan yang membentuk hal tersebut adalah manusia dan manusia ditentukan oleh struktur norma dan nilai. Hal ini disebut dengan konsep *knowledgeable practice* (Karim, 2019).

Kepentingan suatu negara akan selalu berubah seiring dengan adanya pergantian identitas negara tersebut yang diakibatkan oleh perubahan struktur normatif yang ada. Teori konstruktivisme ini fokus kedalam identitas sosial dalam suatu negara ataupun individu yang memiliki peran sebagai aktor di hubungan internasional (Wendt, 1992). Pemahaman ini sangat bertentangan dengan pemikiran rasionalis yang tidak acuh terhadap bagaimana suatu kepentingan dari aktor-aktor tersebut terbentuk.

Setiap aktor pasti berbeda cara pandangannya mengenai masalah yang ada di dunia global ini karena masing masing aktor memiliki pengaruh identitas, nilai dan norma yang berbeda. Kemudian cara aktor memandang suatu masalah inilah

yang menjadi pengaruh di dalam pengambilan kebijakan suatu negara. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan cara pandang yang berbeda dari aktor utama yaitu Trump di dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Uni Eropa yang menyebabkan meningkatnya konflik antara kedua belah pihak tersebut.

Di dalam buku *Foreign Policy Analysis* yang di tulis oleh Marijke Breuning dijelaskan bahwa persepsi pemimpin negara sebagian dikendalikan oleh 4 hal yaitu kepribadian, kepercayaan, pengalaman dan keahlian mereka (Breuning, 2007). Breuning juga menjelaskan bahwa di dalam memahami persepsi pemimpin ini seringkali mengambil pemikiran konsep dari bidang psikologi yang digunakan untuk mempelajari sifat individu, motivasi mereka, pendekatan mereka ketika menyelesaikan masalah dan ketika mengambil sebuah keputusan dan juga pemikiran mereka tentang dunia di sekitarnya.

Hal ini tercermin di dalam banyaknya kebijakan yang dibuat oleh Trump di masa pemerintahannya. Perbedaan persepsi Trump dan juga para pemimpin Uni Eropa didasarkan oleh 4 hal yang dikatakan oleh Breuning. Trump sebagai pribadi yang sebenarnya bukanlah dari kalangan politikus, membawa kepribadian, pengalaman dan keahliannya ketika menjadi seorang pebisnis di dalam merumuskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ciri khas kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat di dalam bidang ekonomi ketika dipimpin oleh Donald Trump mencakup 2 poin penting yaitu;

1. Transaksionalis, pendekatan yang bersifat *business-style* untuk perdagangan internasional. Dengan tujuan untuk bernegosiasi baru atau ulang kebijakan dan perjanjian yang lebih bermanfaat untuk Amerika Serikat.

Hal ini sebenarnya pengaruh dari kebiasaan Trump di dalam bernegosiasi dengan calon investor ketika ia berbisnis.



Trump menganut gaya *quid pro quo* dalam berbisnis yang berarti *give and take* atau *a favor for a favor* (Merriam Webster , n.d.). Jadi jika ada suatu negara yang berbuat baik dan memberikan manfaat yang besar kepada Amerika Serikat, maka Amerika Serikat akan membalasnya dengan kebaikan yang sama juga.

Bukti konkrit bahwa Trump menganut paham ini adalah pada tahun 1975, Trump mengambil inisiasi di dalam perjanjian yang akan membuatnya menjadi orang yang berpengaruh dalam pembangunan *real estate* di Manhattan. Dari kota yang semulanya rusak dan bangkrut, Trump mendapatkan *tax breaks* dari pemerintah New York yang bernilai jutaan dollar pertahun selama 40 tahun dan uang ini digunakan untuk membangun hotel Grand Hyatt. Untuk mendapatkan konsesi tersebut, Trump bekerja melalui koneksi dan melobi *developer*. Awalnya Trump mengadakan meeting tanpa persiapan di *city-hall* untuk mempersuasi para pemilik property yang ada di Manhattan untuk menjual property milik mereka. Di pertemuan ini, walikota Abe Beame mengklaim bahwa “*Anything they want, they get*” (Kruse, 2017).

Trump kemudian mempekerjakan *fundraiser* gubernur Hugh Carey untuk menjadi pelobi dan juga mempekerjakan banyak pengacara yang bekerja untuk kebijakan pemerintah untuk menjadi pengacaranya Trump. Hotel tersebut kemudian memberikan keuntungan di hari ketika dibuka. New York mengeluarkan pajak untuk hotel tersebut yang bernilai lebih dari ratusan juta. Trump tidak lagi memiliki hotel tersebut namun kota New York tetap membayar pajak tersebut sampai April 2020 (Bulgarella, 2019). Hubungan antara sejarah Hotel Grand Hyatt dengan kepribadian Trump adalah Trump akan melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar sekalipun hal tersebut merupakan hal yang illegal. Trump juga menerapkan pahamnya *quid pro quo* disini karena ia awalnya memberikan sesuatu yaitu membangun kota Manhattan yang awalnya ingin bangkrut dan mendapatkan

keuntungan pajak dari pemerintah New York. Hal ini juga berlaku di dalam kerjasama Amerika Serikat dengan Uni Eropa. Trump melihat bahwa Uni Eropa selama ini sudah diberikan kesempatan untuk melakukan balas budi kepada Amerika Serikat, namun Trump menganggap bahwa Uni Eropa malah melakukan hal yang curang dan sewenang-wenangnya diatas 'kebaikan' dari Amerika Serikat.

2. Kebijakan luar negeri yang *value-free*, dimana hubungan kerjasama dinilai berdasarkan apa yang mereka hasilkan untuk Amerika Serikat, tidak didasari oleh nilai-nilai umum, nilai sejarah dan skeptis terhadap demokrasi. (Giovanni, 2016)

Ketika melakukan bisnis, Trump tidak memilih-milih parter kerjasamanya. Trump memiliki banyak sekali partner bisnis dan tersebar di seluruh dunia. Bahkan ia tidak segan untuk bekerja sama dengan pemilik bisnis yang berasal dari negara yang berbeda paham dengan Amerika Serikat seperti Russia dan China bahkan Turki (Alexander, 2017). Hal ini dikarenakan Trump lebih mementingkan hasil dari kerjasama tersebut dibandingkan memikirkan nilai sejarah yang dimiliki oleh keduanya. Hal ini akhirnya menjadi terbawa oleh Trump ke dalam kebijakan luar negeri Trump termasuk didalam kebijakan kerjasama dengan Uni Eropa.

Trump tidak memandang nilai sejarah yang sudah dituliskan Amerika Serikat dengan Uni Eropa merupakan hal yang penting dan menganggap bahwa Uni Eropa dibentuk hanya untuk mengalahkan Amerika Serikat di dalam hal ekonomi (Langlois, 2018). Padahal, semua pemimpin Amerika terdahulu Trump sangatlah mengerti bahwa Uni Eropa dibentuk untuk menjaga perdamaian dikawasan Eropa setelah bertahun-tahun perang. Trump sangat tidak mempedulikan proses pembangunan dari Eropa dan juga tidak memandang penting nilai yang dimiliki oleh *founding fathers* Eropa Jean Monnet dan Robert Schuman dari *European Community*. Hal yang penting menurut Trump adalah bagaimana Uni Eropa

memberikan suatu manfaat kepada Amerika Serikat (Szabo, 2017)

#### **D. Hipotesa**

Dari rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah saya paparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik sebuah hipotesa bahwa alasan meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa adalah karena adanya perubahan identitas antara Obama dengan Trump. Trump sebagai seorang pebisnis membawa norma dan nilai yang ia anut kedalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan Uni Eropa yaitu transaksionalis serta *value-free*.

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian diperlukan untuk membatasi pembahasan dari penelitian bertujuan agar peneliti tidak melebihi materi yang seharusnya dibahas supaya penelitian ini dapat memberikan informasi yang terstruktur dan efisien sehingga mudah untuk dipahami. Jangkauan penelitian dari penelitian ini adalah dari masa pemerintahan Obama sampai Pemerintahan Trump di tahun 2019.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fenomena dunia internasional yaitu mengapa di masa pemerintahan Donald Trump konflik antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa semakin meningkat dengan fokus penelitian di bidang ekonomi.

#### **G. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, hal tersebut karena data empiris yang diperoleh oleh penulis adalah data kualitatif berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka.

Jenis data yang diambil oleh penulis adalah campuran data primer dan juga sekunder. Sumber sumber data yang diambil penulis berasal dari berbagai pernyataan Trump baik di

dalam forum internasional, pidato kenegaraan dan juga cuitan twitter pribadinya kemudian juga sumber lainnya adalah buku, jurnal dan artikel internet yang mendukung.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka dalam mengumpulkan data. Melalui metode ini, data-data dalam penelitian didapatkan melalui literatur literatur berupa buku-buku, jurnal akademis, serta sumber-sumber artikel dari internet dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya untuk merealisasikan sebuah penulisan yang tersusun secara sistematis, penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi lima bab yang berisi tentang:

**BAB I** Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa dan terakhir metodologi penelitian;

**BAB II** BAB ini akan memuat tentang konflik konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa sebelum Donald Trump menjabat menjadi Presiden yaitu ketika masa pemerintahan Barack Obama;

**BAB III** Dalam bab ini penulis akan memuat tentang kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang menjadi indikator meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa di Masa Pemerintahan Donald Trump;

**BAB IV** Bab ini akan menjelaskan tentang ciri khas kebijakan luar negeri Amerika Serikat di dalam bidang ekonomi yang menjadi faktor meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa;

**BAB V** Yang merupakan bab penutup akan berisikan mengenai kesimpulan untuk keseluruhan isi dari skripsi ini disertai dengan saran penulis untuk penelitian yang akan datang.